

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang : 2018-2019
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 36
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Selasa, 23 Oktober 2018
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK.III)
Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara : Membahas pengelolaan Aset-aset Negara yang berada di kawasan PPK-GBK dan PPK-Kemayoran
Ketua Rapat : **H. Zainudin Amali, SE, M.Si/ Ketua Komisi II DPR RI.**
Sekretaris Rapat : Isnu Purwanto, S.IP, MM/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir : A. 28 dari 45 Anggota Komisi II DPR RI
B. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara
C. Dirut PPK GBK
D. Dirut PPK Kemayoran

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Sekretariat Negara, PPK-GBK dan PPK-Kemayoran dengan agenda Membahas pengelolaan Aset-aset Negara yang berada di kawasan PPK-GBK dan PPK-Kemayoran, pada hari Selasa, 23 Oktober 2018, dibuka pada pukul 10.15 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Zainudin Amali, SE, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018, dan meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara, PPK Gelora

Bung Karno, dan PPK Kemayoran untuk tetap memelihara *venue-venue* olahraga yang ada, menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan serta pemanfaatan berbagai fasilitas di area tersebut agar dapat meningkatkan perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

2. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk mempersiapkan/ membuat perencanaan yang komprehensif terkait pemanfaatan dan pemeliharaan *venue-venue* olahraga beserta fasilitasnya agar dapat terus digunakan di masa yang akan datang.
3. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara, PPK GBK dan PPK Kemayoran untuk memperhatikan pengamanan aset-aset Negara yang berada di bawah kewenangan dan pengelolaan Kementerian Sekretariat Negara, PPK GBK dan PPK Kemayoran.
4. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara dan PPK GBK untuk segera melakukan evaluasi terhadap keberadaan lapangan tembak senayan, mengingat lokasinya saat ini yang berdekatan dengan gedung MPR/DPR RI, kantor pemerintahan, sekolah, hotel dan lain-lain, serta merekomendasikan untuk direlokasi ke tempat yang lebih layak.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.45 WIB.

Jakarta, 23 Oktober 2018
KETUA RAPAT

ttd

H. ZAINUDIN AMALI, SE, M.SI
A-292